

Isu Terorisme dalam Bingkai Majalah Isra' (Analisis Framing Berita Terorisme Pada Majalah Isra' Rubrik 'Suara Khadijah')

Dendy H. Nanda

Institut Agama Islam Negeri Kerinci

dendynanda90@gmail.com

Abstract. This study wants to answer how Isra Magazine 'frames the issue of terrorism' in the 'Voice of Khadijah' rubric. This study uses a qualitative approach by analyzing news texts on the issue of terrorism using framing device Robert N. Enmant as an analytical tool, namely Define Problem, Causal Interpretation, Moral Evaluation, and Treatment Recommendation. The results of this study found three main frames in the coverage of Isra' Magazine related to the issue of terrorism, namely, first, violations of legal procedures. Police officers (especially Detachment 88) violated legal procedures in an effort to deal with suspected terrorist acts, both in terms of raids, arrests, detentions, and trials. Second, violations of human rights (HAM). The alleged perpetrators of terrorism and their families have become victims of human rights violations by the police and mainstream media reports. Third, the mainstream media is not neutral and objective in covering terrorism. The coverage carried out by the mainstream media often discredits suspected terrorist acts and their families. The mainstream media is accused of being just a mouthpiece for the government, in this case the police. Thus, it can be concluded that Isra' Magazine's position in looking at terrorism issues is that there is a tendency for Isra' Magazine to "defend" suspected terrorist acts and place state apparatus and mainstream media as sources of problems, even though from the beginning they emphasized that there was no special agenda to defend terrorism.

Keywords: *Framing, Media, Terrorism, Human Rights (HAM)*

Abstrak. Penelitian ini ingin menjawab bagaimana Majalah Isra' membingkai isu terorisme dalam rubrik 'Suara Khadijah'. Penelitian ini hanya menggunakan satu majalah sebagai objek kajian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisa teks-teks berita mengenai isu terorisme dengan menggunakan perangkat framing Robert. N. Enmant sebagai perangkat analisis, yaitu Define Problem, Causal Interpretation, Moral Evaluation, dan Treatment Recommendation. Hasil penelitian ini menemukan tiga bingkai utama dalam pemberitaan Majalah Isra' terkait isu terorisme yaitu, pertama, pelanggaran prosedur hukum. Aparat kepolisian (terutama Densus 88) melakukan pelanggaran prosedur hukum dalam upaya proses penanganan terduga pelaku tindak terorisme baik dari segi penggerebekan, penangkapan, penahanan, dan peradilan. Kedua, pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Terduga pelaku tindak terorisme dan keluarga telah menjadi korban pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan pemberitaan media arus utama. Ketiga, media arus utama tidak netral dan objektif dalam melakukan peliputan terorisme. Pemberitaan yang dilakukan media arus utama kerap kali mendiskreditkan terduga tindak pelaku terorisme dan keluarga.

Media arus utama dituding hanya sebagai corong suara pemerintah, dalam hal ini lembaga kepolisian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa posisi Majalah Isra' dalam melihat isu terorisme adalah ada kecenderungan Majalah Isra' "membela" terduga pelaku tindak terorisme serta menempatkan aparatur negara dan media arus utama sebagai sumber permasalahan, meskipun sedari awal mereka menegaskan tidak ada agenda khusus untuk membela terorisme.

Keywords: Framing, Media, Terorisme, Hak Asasi Manusia (HAM)

PENDAHULUAN

Semenjak aksi teror yang menimpa Amerika Serikat pada tahun 2001 lalu, atau lebih dikenal dengan serangan 11 September di menara kembar *World Trade Center* (WTC), perbincangan mengenai terorisme di media massa seakan tidak pernah ada habisnya (Waluyo, 2009: 3). Aksi terorisme selalu menjadi bahan menarik untuk diberitakan media massa. Sejumlah media massa, baik luar negeri maupun di Indonesia sendiri tak pernah melewatkannya pemberitaan tentang terorisme. Begitupun halnya dengan Majalah *Isra'*.

Majalah *Isra'* merupakan media yang diterbitkan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham UII) Yogyakarta. Secara umum, majalah ini melaporkan perihal kelompok-kelompok tertentu yang selama ini dituduh sebagai jaringan teroris dan beraliran Islam radikal di tanah air, terutamanya pesantren-pesantren di berbagai wilayah di seluruh Jawa. Dari produksi teks berita dalam Majalah *Isra'*, sepintas terlihat pembelaan majalah ini terhadap kelompok-kelompok tertentu yang selama ini dianggap sebagai jaringan teroris dan beraliran Islam radikal, seperti halnya media-media Islam lain yang keras seperti Majalah *Sabili*, Majalah *Hidayatullah*, Majalah *Ar-Risalah*, Majalah *As-Sunnah* dan lain sebagainya (*Savic Ali: Media-Media Garis Keras Punya Semangat Mengimpor Konflik*, 2016). Tapi, dari wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu redaktur Majalah *Isra'*, (Kamil, wawancara, 2016) didapatkan keterangan bahwa majalah ini sebenarnya tidak dalam rangka untuk membela teroris itu sendiri. Melainkan menyoroti persoalan atau dimensi hak asasi manusia (HAM) yang kerap kali diabaikan dalam persoalan terorisme di Indonesia, baik oleh aparat sendiri

(terutama dalam hal ini Densus 88), maupun oleh media-media arus utama saat mengabarkan peristiwa-peristiwa penindakan orang atau kelompok tertentu yang dianggap dan diduga sebagai teroris. Tak banyak media yang berani mengambil posisi seperti Majalah *Isra'* ini, sebab resikonya cukup besar: dituding membela teroris. Namun, pengakuan ini kemudian tidak lantas menjadi cerminan bagi peneliti untuk melihat posisi Majalah *Isra'* secara tergesa-gesa.

Dalam Majalah *Isra'* terdapat sebuah rubrik khusus bernama “Suara Khadijah”. Sama seperti laporan-laporan berita lainnya dalam Majalah *Isra'* yang terkesan memberikan pemihakan pada orang atau kelompok yang selama ini dituduh teroris, rubrik “Suara Khadijah” ini juga memiliki kecenderungan yang sama. Namun yang menarik, rubrik “Suara Khadijah” ini secara khusus merekam suara hati perempuan-ROperempuan terdekat dari orang yang terduga pelaku terorisme, baik istri maupun ibu kandungnya sendiri. Laporan berita dalam rubrik “Suara Khadijah” ini, seperti halnya dalam rubrik-rubrik yang lain di Majalah *Isra'*, ditulis dalam bentuk *feature*.

Perlu diketahui bahwa semangat Majalah *Isra'* ini sebenarnya diturunkan dari gagasan besar Dr. M. Busyro Muqoddas (salah satu pendiri Pusham UII) yang dimuat dalam karya disertasinya yang sudah dibukukan dengan judul “*Hegemoni Rezim Intelijen*”. Menurut dia, ada banyak persoalan yang ganjil dan belum banyak diketahui publik terkait bagaimana seseorang yang selama ini diduga teroris diperlakukan oleh kekuasaan negara yang tak jarang dipenuhi rekayasa-rekayasa. Seperti penangkapan yang tanpa menggunakan surat, kekerasan dalam interogasi, tuduhan yang dipaksakan penyidik, intervensi militer, tidak didampingi pengacara, hak dan fasilitas tahanan yang tidak manusiawi, intimidasi, hingga jangka waktu penahanan yang melampaui batas undang-undang (Muqodas, 2011) dan lain sebagainya. Artinya, Busyro melihat ada banyak dimensi pelanggaran HAM dalam

konteks pemberantasan terorisme di tanah air. Berangkat dari gagasan besar seperti ini, Majalah *Isra'* digagas.

Namun demikian, jika mengacu pada cara pandang Reese terhadap media (2008: 19), pemilik media memungkinkan dapat membuat *frame* tertentu karena dia memiliki akses penuh terhadap sumber daya dan wacana pengetahuan tertentu. Dalam konteks ini, seperti yang ditulis sebelumnya bahwa Majalah *Isra'* berada di bawah naungan Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham UII) Yogyakarta. Posisi Pusham UII di sini adalah pemilik sarana produksi dalam bentuk media. Jika, media dianggap tak lepas dari kepentingan, pemilik media akan berusaha melakukan kontrol melalui setiap pemberitaannya, termasuk Pusham UII untuk menjamin kepentingannya.

Menarik kemudian melihat agenda apa dibalik Pusham UII melalui Majalah *Isra'*-nya. Realitas seperti apa yang kemudian ingin dikonstruksi Majalah *Isra'* melalui pemberitaannya. Untuk menjawab kecurigaan tersebut maka peneliti ingin terlebih dahulu melihat bagaimana praktik pembingkaian berita dalam Majalah *Isra'* pada rubrik “Suara Khadijah”. Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melihat bagaimana Majalah *Isra'* melakukan pembingkaian isu terorisme yang terjadi di Indonesia. Sehingga fokus masalah penelitian ini adalah: Bagaimana Majalah *Isra'* membingkai isu terorisme dalam rubrik “Suara Khadijah”?

Pada penelitian ini paradigma adalah paradigma konstruktivisme. Konstruktivisme mempunyai penilaian tentang bagaimana media, wartawan dan berita dilihat. Fakta/peristiwa adalah hasil konstruksi. Realitas bersifat subjektif, realitas hadir karena dihadirkan oleh konsep subjektif wartawan. Realitas tercipta melalui konstruksi, sudut pandang tertentu dari wartawan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif tidak menggunakan perhitungan angka,

tapi lebih menekankan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis ataupun lisan, menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Moleong, 2008: 67).

Penelitian ini akan menggunakan analisis *framing*, terutama model analisis *framing* yang dikembangkan oleh Robet N. Entman sebagai piranti analisis untuk membedah realita yang dikonstruksi oleh media. Alasan penulis menggunakan model analisis *framing* Robert N. Entman karena menurut penulis ada kesesuaian skema analisis dalam membedah isu yang ingin diangkat dalam penelitian ini. Selain itu, penulis menganggap model analisis *framing* Robert N. Entman dapat melihat secara detail mengenai bagaimana memaknai teks berita pada sebuah media.

Framing dalam model Entman menggunakan empat langkah analisis (Entman, 1993). Berawal dari *define problem*, yaitu menganalisis tentang bagaimana masalah tersebut dilihat. Atau dilihat sebagai apa, dan sebagai masalah apa. Lalu analisis berlanjut ke tahap kedua yaitu *diagnose causes*, langkah ini melihat oleh apa sebuah peristiwa disebabkan? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa (aktor) yang dianggap penyebab dari suatu masalah? Tahap ketiga analisis berlanjut dengan menggunakan *make moral jugdement*, langkah ini melihat nilai moral apa yang berikan media untuk menjelaskan sebuah masalah, atau nilai moral apa yang digunakan media untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan. Langkah yang terakhir dari model Entman ini adalah *treatment recommendation*, yaitu solusi atau penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/isu. Namun *treatment recommendation* tidak peneliti pakai dalam melakukan analisis penelitian (Eriyanto, 2011). Alasannya, karena peneliti menilai perangkat tersebut tidak ditemukan pada pemberitaan Majalah *Isra'*.

Tabel 1
Tabel Konsep dan Indikator Penelitian

Konsep	Makna Konsep	Indikator
Berita Terkait Isu Terorisme	Berita dari Majalah <i>Isra'</i> yang menyajikan isu terorisme sebagai salah satu bahasan	<ul style="list-style-type: none">- Berita penggerebekan terduga pelaku terorisme di majalah <i>Isra'</i>- Berita penangkapan terduga pelaku terorisme di Majalah <i>Isra'</i>- Berita penahanan terduga pelaku terorisme di Majalah <i>Isra'</i>- Berita pengadilan terduga pelaku terorisme di Majalah <i>Isra'</i>

Model Analisis Framing	Model analisis yang dipakai untuk melihat pembingkain persoalan tertentu di media	<ul style="list-style-type: none">- Mendefinisikan permasalahan isu terorisme yang ada pada Majalah <i>Isra'</i> terkait penggerebekan, penahanan, penangkapan dan pengadilan terduga pelaku terorisme- Memperkirakan aktor atau sumber masalah isu terorisme yang ada pada Majalah <i>Isra'</i> terkait penggerebekan, penangkapan, penahanan, dan pengadilan terduga pelaku terorisme- Memberikan penilaian moral yang ada pada berita Majalah <i>Isra'</i> terkait penggerebekan, penangkapan, penahanan, dan pengadilan terduga pelaku terorisme
Framing Media	Bagaimana media melakukan konstruksi realitas dalam pemberitaannya.	<ul style="list-style-type: none">- Isu terorisme dilihat sebagai bagian dari masalah HAM- Isu terorisme dilihat sebagai bagian dari masalah hukum- Isu terorisme dilihat sebagai masalah stigmatisasi dan keberpihakan media pada aparat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Framing Pemberitaan Terkait Penangkapan

Pertama, Majalah *Isra'* melihat isu terorisme terkait penangkapan sebagai masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Pelanggaran HAM seringkali menimpa terduga pelaku terorisme beserta keluarga. Pelanggaran-pelanggaran HAM tersebut hadir dalam bentuk yang berbeda-beda. Misalnya, aparat Densus 88 melakukan kekerasan fisik maupun mental pelaku teroris, melakukan penangkapan sepihak tanpa adanya pra-peradilan dan atas praduga tidak bersalah, melakukan intimidasi dan tekanan kepada terduga pelaku terorisme agar mengakui kejahatannya.

Sebagai majalah yang juga fokus pada persoalan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap terduga pelaku terorisme, tentu Majalah *Isra'* akan banyak memberitakan terkait isu pelanggaran HAM dalam semua rubriknya termasuk dalam rubrik “Suara Khadijah”. Dalam berita berjudul “Mengenang Lagu Ciptaan Sang Anak” ini, jurnalis Majalah *Isra'* juga memberitakan bagaimana pelanggaran HAM terjadi pada terduga pelaku terorisme dan keluarganya. Diceritakan oleh jurnalis Majalah *Isra'* pelanggaran HAM yang terjadi pada Sigit Qordhowi dan keluarganya dengan berbagai cara mulai dari penembakan tanpa pengadilan terduga pelaku terorisme hingga intimidasi terhadap terduga pelaku terorisme oleh aparat.

Kedua, dalam proses penangkapan dan penggerebekan terduga pelaku terorisme, aparat kepolisian dibingkai oleh Majalah *Isra'* melanggar prosedur hukum. Detasemen khusus (Densus) 88 sebagai bagian dari aparat kepolisian digambarkan tidak mematuhi prosedur hukum yang berlaku di negara ini. Tindakan-tindakan seperti intimidasi, konspirasi, merekayasa alat bukti serta menggunakan kekerasan kerap dilakukan oleh Densus 88 dalam proses penangkapan.

Ketiga, stigmatisasi dan keberpihakan pemberitaan media umum. Majalah *Isra'* melalui pemberitaannya, memandang media massa baik

elektronik maupun media cetak dalam peliputannya dipandang tidak netral dan cenderung memihak. Hal itu dilihat dari bagaimana media umum tersebut melakukan pemberitaan dari salah satu sudut pandang saja, yakni aparatur negara. Alat-alat bukti penangkapan yang belum diklarifikasi kebenarannya dan hanya didapat dari keterangan aparat kepolisian, namun temuan tersebut sudah diberitakan sebagai alat bukti kejadian terorisme. Pemberitaannya juga dinilai cenderung melakukan stigmatisasi berlebih terhadap terduga beserta keluarga. Stigma teroris yang melekat pada terduga dan keluarga tidak lain adalah akibat dari pemberitaan yang dilakukan media-media arus utama.

Dalam melakukan pembingkain berita *ala* Robert N. Entman terkait pemberitaan penangkapan, peneliti berupaya mengidentifikasi aktor pembuat masalah. Majalah *Isra'* melihat aparat kepolisian terutama Densus 88 dan media-media arus utama sebagai sumber utama permasalahan. Majalah *Isra'* memandang aparat kepolisian bertindak arogan dalam upaya penggerebekan dan penangkapan. Cara-cara kekerasan seringkali dikedepankan dalam proses penggerebekan dan penangkapan. Densus 88 dipandang melanggar HAM dalam memperlakukan terduga pelaku terorisme beserta keluarga. Anak-anak hingga orang tua yang tidak bersalah diperlakukan tidak manusiawi seperti dibentak, bahkan dipukul. Perlakuan aparat menimbulkan traumatis tersendiri bagi para keluarga terduga pelaku terorisme.

Framing Berita Terkait Penggrebekan

Frame utama pada pemberitaan terkait penggerebekan di *Majalah Isra'* adalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Pemberitaan menekankan permasalahan pada aspek kemanusiaan. Aparat kepolisian dari Mabes Polri diberitakan telah melakukan kekerasan dalam melakukan penggerebekan terhadap pelaku terorisme.

Dalam melakukan penggerebekan misalnya, Densus 88 digambarkan sebagai lembaga yang sembrono dalam melakukan pengerebekan. Ini dilihat

dari cerita sang bapak terduga teroris, Baihaqi yang diberitakan sebagai korban salah tangkap. Selain itu, Densus 88 diceritakan telah melakukan tindakan kekerasan dalam peroses penggerebekan.

Majalah *Isra'* memaparkan aparat kepolisian bertindak arogan dalam penggerebekan. Densus 88 sebagai aparat yang bertugas khusus dalam penanganan pelaku terorisme (contok kasus Abu Muslima) digambarkan bertindak kasar pada saat penggerebekan. Salah seorang anggota Densus 88 bahkan digambarkan secara detail menodongkan senjata kepada anak-anak. Selain itu, anggota densus 88 tidak menghargai orang yang sedang menjalankan ibadah dalam melakukan penggrebekan. Kejadian itu tergambar melalui penuturan hasil wawancara dengan isteri dari Abu Muslima sendiri, Mimi. Majalah *Isra'* secara tersirat ingin menyampaikan kepada pembaca, sebagai negara yang terkenal sebagai mayoritas Islam, perlakuan seperti itu agak sulit diterima.

Framing Pemberitaan Terkait Penahanan dan Pengadilan

Dalam pemberitaan terkait penahanan ada dua *frame* yang sangat ditonjolkan oleh Majalah *Isra'*. Pertama, Pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Hal ini dapat dilihat pada Barita pada edisi Juli, Majalah *Isra'* juga membungkai pemberitaanya terkait penahanan. Disini disbutkan bahwa aparat kepolisian membatasi hak dari terduga terorisme yakni bertemu dengan keluarganya. Pengawasan yang ketat dilakukan aparat terhadap terduga terorisme ketika bertemu dengan keluarga. Selain itu pengacara dari terduga terorisme telah ditentukan oleh aparat negara. Hak untuk mendapatkan pengacara sesuai dengan kemaun terduga terorisme tidak dipenuhi oleh aparat negara.

Kedua, Pelanggaran prosedur hukum oleh aparat kepolisian. Pada pembeberita Majalah *Isra'* edisi September yang berjudul “Cukup Allah Tempat Mengadu”. Bingkai berita dalam kasus penahanan adalah pelanggaran prosedur hukum yang dilakukan oleh aparatur negara.

Majalah *Isra'* menuliskan bahwa terduga teroris Abu Muslima ditahan oleh aparat kepolisian dengan setatus hukum yang tidak jelas. Pada Pasal 7 UU No. 11 tahun 1963, dijelaskan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain yang berlaku bagi penahanan sementara, Jaksa Agung/Oditur Jendral dalam batas wewenangnya masing-masing, berwenang pula memerintahkan penahanan terhadap seseorang yang dituduhkan melakukan kegiatanervesifuntuk selama-lamanya satu tahun. Jika kita mengacu kepada undang-undang tersebut maka bingkai yang ingin ditekankan pada tesk berita diatas adalah, penahan yang dilakukan oleh aparatur Negara telah melanggar undang-undang yang sudah ditetapkan.

Begitupun halnya pada proses pengadilan. Majalah *Isra'* membingkain pemberitaannya bahwa aparatur negara telah melakukan pelanggaran dalam proses pengadilan. ini terlihat dari pemberitaan Majalah *Isra'* pada berita yang berjudul “Saat Sang Anak Menjadi Korban”. Suami dari Ely terduga teroris yang tidak disebutkan namanya dalam berita Majalah *Isra'* dibingkai telah menjadi korban kesalahan prosedur hukum dalam pengadilan. Persidangan yang dijalani oleh suami Ely dibingkai oleh Majalah *Isra'* adalah sebagai akal-akalan semata. Persidangan tersebut disebutkan oleh majalah ini telah melanggar undang-undang. Tujuan ditangkapnya suami Ely adalah untuk kepentingan penangkapan Abu Bakar Ba'asyir. Di majalah *Isra'* ini juga disebutkah bahwa suami Ely adalah Bendahara dari Abu Bakar Ba'asyir. Jadi majalah *Isra'* menilai bahwa suami dari Ely adalah tumbal untuk menangkap target yang lebih besar lagi yakni, Abu Bakar Ba'asyir.

Majalah *Isra'*: Media “Perlawanan” Atas Media *Mainstream*

Dalam masyarakat yang serba termediasi seperti sekarang ini, sebagian besar dari kita mungkin memahami makna terorisme dari media. Apa itu teroris, siapa itu teroris, bagaimana itu teroris, semua itu kita dapat dari

pemberitaan media—baik media cetak, elektronik, maupun media online. Media sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Kita tidak bisa lepas dari media. Seperti yang dikatakan oleh Mc Luhan (1967:7), "*medium is extension of man*" (media adalah perpanjangan instrumen indra manusia). Media ditempatkan sebagai sarana untuk mengakses apapun dalam lingkungan masyarakat, termasuk informasi mengenai terorisme.

Kini, setelah terjadi beberapa rentetan peristiwa teror yang kemudian diberitakan secara intens oleh media, kita menjadi tahu hal-ikhwal mengenai terorisme. Namun pengetahuan kita terkait terorisme, diakui atau tidak, tidak lebih dari sebatas hasil konstruksi yang dibangun oleh media itu sendiri. Ini terjadi karena media mempunyai peran yang penting dalam mengiring pengetahuan kita: terorisme itu keji, pembunuhan, tak beradab, semuanya itu kita dapat setelah kita menyaksikan pemberitaan di media. Media mempunyai peran besar dalam mengisi pengetahuan kita tentang terorisme. Dengan jaringan yang luas untuk media televisi, suplai yang besar bagi media cetak dan persoalan kepemilikan yang tunggal dari beberapa media, tentu saja pemberitaan yang kita dapat akan seragam. Apalagi ketika media telah berkembang menjadi sebuah industri yang lebih memperhitungkan profit ketimbang substansi informasi dan tanggung jawab sosial sebagai agen penyulur informasi.

Dalam pengemasan berita, kita memahami bahwa tidak ada media massa yang benar-benar netral dan objektif dalam peliputan. Selalu ada keberpihakan. Hal ini terjadi karena ada proses seleksi informasi yang berdampak pada penseleksian terhadap realitas. Selain itu, teks dalam media selalu memiliki kepentingan yang bersifat ideologis (Stuart, 2011: 64). Menurut (Nugroho et al., 1999: 4) media yang satu dengan media yang lain memungkinkan untuk melihat serta mengkonstruksi realitas dan wacana dari sudut pandang yang berbeda, meskipun dibangun dari kenyataan yang sama. Hal itu bisa dilakukan dengan cara penonjolan fakta berita yang menggiring

perhatian publik pada titik tertentu yang kemudian melahirkan persepsi yang berbeda atas realitas tertentu.

Begitu juga di balik gembar-gembor pemberitaan media terkait terorisme, ada yang terlupakan dan tak tersentuh oleh media *mainstream* tersebut. Tidak lain adalah persoalan hak asasi manusia (HAM). Peliputan media-media besar tersebut terlalu sibuk memberitakan isu-isu negatif terkait pelaku terorisme. Betapa kejinya aksi teror, ribuan jiwa melayang dan lain sebagainya. Hampir tidak satupun media-media besar itu memberi ruang dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya soal kerja-kerja Densus 88 yang kerap berlebihan dan melanggar prinsip HAM asas duga tak bersalah dalam melakukan eksekusi. Media-media besar malah tak jarang ikut mendampingi Densus 88 saat melakukan penangkapan yang disertai penembakan pada orang-orang yang diduga teroris, hanya sekedar untuk bersaing mendapatkan laporan yang paling eksklusif dan meningkatkan rating.

Media-media *mainstream* absen dalam melihat sisi kemanusian dari para pelaku terorisme ini karena memang terasa kurang seksi secara pemberitaan. Sehingga menjadi wajar jika media lupa atau bahkan mungkin sengaja melupakan konsep dasar dari hak yang dimiliki oleh seluruh umat manusia. Media cenderung mengabaikan bahwa terduga teroris adalah kaum minoritas yang tidak semestinya diadili di dalam teks berita. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena dia manusia. Seberapapun buruk perlakuan yang diterima oleh seseorang dan atau betatapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan pernah berhenti menjadi manusia dan oleh karena itu ia tetap memiliki hak-hak tersebut. Karena hak-hak tersebut melekat di dalam dirinya sebagai makhluk insani. Gagasan hak asasi manusia ini bersumber dari hukum hak kodrati (*natural right theory*) sebagai landasan dari dasar-dasar hak asasi manusia yang dimunculkan oleh ahli filsafat hukum yakni Thomas Aquinas abad ke 13 (Lawson dalam Muqoddas 2011: 52). Filsuf hukum hak kodrati *Pasca-*

Renaissance, Jhon Locke, mengemukakan pemikirannya mengenai hak kodrati pada masa revolusi Prancis, "semua individu dikarunia oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri yang tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh Negara" (2008:11).

Thontowi (2013: 6) mempertanyakan apakah benar bom teroris di kalangan gerakan sipil merupakan peristiwa tunggal ataukah merupakan reaksi terhadap perilaku negara dengan masyarakat yang timpang sebagai akibat negara gagal memenuhi kewajiban konstitusionalnya. Pertanyaan tersebut ada benarnya karena seperti yang kita ketahui banyak aksi dari kalangan minoritas disebabkan oleh masalah kesetaraan. Ada hak-hak mereka yang tidak terpenuhi oleh negara. Begitu juga dengan masalah terorisme.

Selain itu, masih ada keluarga pelaku yang sama sekali tidak tahu menahu persoalan terorisme tapi ikut terkena dampak karena pemberitaan media. Stereotip yang dibangun media terkadang terlalu berlebihan dan bias serta berpotensi "melukai" banyak orang. Ketua Komite Nasional Hak Asasi Manusia, Abdul Hakim Garuda Nusantara memaparkan, sekalipun kelompok terorisme Bom 1 dan 2 berlatar belakang pesantren, tidak bisa kemudian dituding pelaku peledakan dialamatkan kepada kelompok pesantren. Menurutnya, jebakan stereotip seperti itu tidak akan membangun budaya hukum yang sehat (Abimayu, 2006: 93).

Penonjolan-penonjolan pemberitaan dari satu sisi tersebut semakin membuat pandangan kita bias ketika melihat realitas sebenarnya dari para pelaku teroris. Citra negatif teroris yang dibangun media-media *mainstream* mengaburkan pandangan kita dalam melihat sisi lain dari para aktor teroris. Menurut Sukarno (2011), keterbatasan ruang bagi media massa dalam meliput realitas terorisme dapat memicu persoalan yang berkaitan dengan hasil akhir peliputan yang berwujud berita. Media massa tidak hanya dituntut untuk

menghasilkan informasi, namun media massa juga memiliki tanggung jawab agar informasi tersebut bermanfaat bagi khalayak (2011: 359).

Majalah Isra kemudian hadir mengisi celah dan “kekosongan” tersebut. Majalah Isra mengangkat isu terorisme dari sudut pandang yang berbeda. Media ini mencoba melihat isu terorisme dari sisi kemanusiaan dan dimensi pelanggaran HAM dari orang-orang atau kelompok-kelompok yang selama ini diduga teroris—yang sering dilupakan atau sengaja diabaikan oleh media-media *mainstream*.

Majalah Isra' bisa dikatakan sebagai media alternatif dalam melihat sisi lain dari persoalan terorisme. Melihat dari sudut pandang yang berbeda ketika membedah isu terorisme. Fuch (2010: 178), secara lugas membedakan dimensi media tradisional/kapitalis dan media alternatif dari segi konten media. Konten media tradisional sangat ideologis. Sementara media alternatif berisi konten kritis. Namun demikian, untuk mendefinisikan media alternatif kita harus terlebih dahulu mendefinisikan media *mainstream*, karena media alternatif adalah antitesis dari media *mainstream* atau media arus utama. Media *mainstream* adalah media yang sudah ada sebelumnya, sementara media alternatif, sesuatu yang baru, media yang lahir untuk mencari perbedaan dari media arus utama yang sudah mapan. Chomsky (1997) mendefinisikan media *mainstream* yakni media yang menjangkau banyak khalayak mencerminkan aktifitas, pemikiran atau isu yang dominan. Media *mainstream* juga didefinisikan media yang mewakili pemerintah dan korporasi (Herman & Chomsky, 1988). Jadi menurut Atton (2002), media alternatif kerap didefinisikan sebagai media non-komersial yang mewakili berbagai kepentingan berbagai golongan di luar arus utama seperti golongan minoritas.

Menurut Dr. M. Busyro Muqoddas (salah satu pendiri Pusham UII) yang dimuat dalam karya disertasinya yang sudah dibukukan dengan judul "*Hegemoni Rezim Intelijen*". Ada banyak persoalan yang ganjil dan belum

banyak diketahui publik terkait bagaimana seorang terorisme di perlakukan oleh Negara. Seperti penangkapan yang tanpa menggunakan surat, kekerasan dalam interogasi, tuduhan yang dipaksakan penyidik, intervensi militer, tidak didampingi pengacara, hak dan fasilitas tahanan yang tidak manusiawi, intimidasi, hingga jangka waktu penahanan yang melampaui batas undang-undang (2011). Artinya, Busyro melihat ada banyak dimensi pelanggaran HAM dalam konteks pemberantasan terorisme di tanah air.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis yang sudah dipaparkan di bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan posisi Majalah *Isra'* dalam melakukan pembingkaihan pada rubrik "Suara Khadijah" edis Juni-November tahun 2012. Peliputan berita isu terorisme pada Majalah *Isra'* dibagi ke dalam tiga bingkai utama, yakni, *Pertama*, pelanggaran prosedur hukum. Aparat kepolisian dinilai gagal dalam penegakan hukum. *Kedua*, pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Terduga tindakan pelaku terorisme dan keluraganya diposisikan oleh Majalah *Isra'* sebagai orang yang dilanggar haknya sebagai manusia. *Ketiga*, pemberitaan media arus utama. Media arus utama dinilai tidak objektif dan netral dalam melakukan pemberitaan. Ketiga bingkai tersebut bisa kerecukan pada satu bingkai saja yaitu pelanggaran HAM.

Dari kesemua bingkai yang dikonstruksi oleh Majalah *Isra'*, realitas yang dihadirkan pada pembaca adalah kecenderungan Majalah *Isra'* "membela" terduga pelaku terorisme beserta keluarga. Ini dikuatkan dengan beberapa fakta yang didapat di dalam media: *Pertama*, pemilihan narasumber berita. Narasumber yang diambil hanya pada satu sisi saja yakni keluarga terduga pelaku terorisme. Majalah *Isra'* hanya melakukan wawancara dengan ibu, isteri dari terduga pelaku terorisme dan orang terdekat. *Kedua*, pemilihan bahasa. Bahasa yang digunakan dalam teks pemberitaan isu terorisme cenderung mendiskreditkan aparat Densus 88 dan media arus utama. Bahasa-bahasa yang digunakan ketika menggambarkan aparat Densus 88 dan media

arus utama sangat kontras dengan bahasa yang dipakai untuk menggambarkan terduga pelaku terorisme beserta keluarga. Seperti kata densus 88 bertindak arogan, kasar, main hakim sendiri, media umum tidak objektif, menstigmakan teroris pada pelaku beserta keluarga, dsb. Sementara itu, untuk menggambarkan terduga pelaku terorisme pemilihan bahasa yang digunakan cenderung bernada positif seperti kata baik, manja, penuh kasih sayang, rajin ibadah, menegakan *amar ma'ruf nahi mungkar*, berjiwa sosial yang tinggi, dan sebagainya.

Penelitian ini memiliki beberapa kelemahan *Pertama*, peneliti hanya menggunakan satu media sebagai unit analisis, sehingga tidak ada media pembanding untuk melihat bingkai berita isu terorisme di media yang lain. Selain itu keterbatasan waktu dalam mengumpulkan unit analisis menjadi alasan penulis tidak melihat bingkai berita dari media yang lain. *Kedua*, berita Majalah *Isra'* yang penulis ambil untuk unit analisis penelitian hanya pada rubrik "Suara Khadijah" saja. Jadi, disarankan bagi peneliti lain yang berminat melakukan penelitian serupa pada Majalah *Isra'* ada baiknya melihat berita secara menyeluruh dari setiap rubrik, agar data yang didapat lebih mendalam. *Ketiga*, penelitian ini hanya berbatas pada penelitian teks, sehingga menurut hemat penulis ada baiknya dilakukan penelitian pada aspek lain, misalnya dengan menggunakan pendekatan ekonomi politik media.

DAFTAR REFERENSI

- Chomsky, N. (1997). *What Makes Mainstream Media Mainstream*. Chomksy.info.
https://chomsky.info/199710__/
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. *Journal of Communication*, 43(4).
- Eriyanto. (2011). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. LKIS.
- Herman, E. S., & Chomsky, N. (1988). *Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media*. Pantheon Books.
- Moleong, L. J. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

- Muqodas, B. (2011). *Hegemoni Rezim Intelijen: Sisi Gelap Peradilan Kasus Komando Jihad*. Pusham UII.
- Nugroho, B., Eriyanto, & Surdiasis, F. (19999). *Politik Media Mengemas Berita*. Institut Studi dan Informasi.
- Savic Ali: *Media-Media Garis Keras Punya Semangat Mengimpor Konflik*. (2016). Remotivi. <https://www.remotivi.or.id/wawancara/274/savic-alii-media-media-garis-keras-punya-semangat-mengimpor-konflik>
- Stuart, H. (2011). *Budaya Media Bahasa, Teks Utama Perancang Cultural Studies 1972-1979*. Jalasutra.
- Thontowi, J. (2013). *Terorisme Negara: Kerjasama Konspiratif Menjinakan Islam Fundamentalis*. UII Press.
- Waluyo, S. (2009). *Kontra Terorisme: Dilema Indonesia Era Transisi*. NF Media Center.